



Efisiensi Kerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemajuan Teknologi di Era Modern

Muhammad Hafidz Rafli¹, Rian Samya Weka Pratama²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

Abstrak

Deep efficiencyRegional financial management is one of the important things in facing technological changes in the modern era. In this case, accelerating technology in the regional financial management process is crucial to achieving sustainable progress. The implementation of a technology-based financial system enables more precise and accurate monitoring, faster reporting and more transparent management. In addition, the use of digital tools can reduce bureaucracy and speed up decision processes, increase efficiency and optimize resource allocation. By utilizing technology, work efficiency in regional financial management can increase, allowing regional governments to focus on innovation and meeting community needs more precisely and effectively. The existence of the e-SPPT (Electronic-Based Regional Tax Notification) service is a clear example of how technological changes in the modern era encourage efficiency. Even though it faced several challenges in its implementation, this innovation managed to run smoothly and the obstacles that emerged were successfully overcome. The innovation of tax payments through the e-SPPT system by the Semarang Regency Regional Tax Payment Office, which enables online PBB payments through various partners such as banks and e-commerce platforms, has proven its effectiveness. By providing a virtual account (VA) code to the public for payment according to a predetermined nominal amount, this innovation enables easier, more flexible and administratively efficient tax payment skills.

Keywords: *efisiensi, e-SPPT, Platform, inovasi*

(*) Corresponding Author: hafidz21@students.unnes.ac.id

How to Cite: Rafli, M. H., & Pratama, R. S. W. (2024). Efisiensi Kerja dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemajuan Teknologi di Era Modern. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790056>.

PENDAHULUAN

Era Reformasi atau pasca lengsernya Presiden ke-2 Negara Republik Indonesia yaitu presiden Soeharto dimulai pada tahun 1998 setelah terjadinya aksi demonstrasi pada masa itu. Pada era reformasi ini terjadi berbagai perubahan yang salah satunya terjadi dalam reformasi pemerintah yaitu pemberian otonomi daerah yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan kebebasan kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan otonomi daerah berlaku sejak ditetapkannya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemerintah pusat yang memberikan kewenangan khusus



dalam melakukan proses pembangunan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat daerah dapat menjalankan sendiri dan dapat menikmati hasil pembangunan. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya pembaharuan terhadap tata cara pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan perubahan pemerintahan baru yang berlaku pada saat itu maka, pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004. Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa dampak yang besar pada struktur pengelolaan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang menonjol adalah dengan perubahan dalam pola pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 dengan pemerintah daerah yang dituntut untuk mandiri dalam mengelola keuangannya dan kebutuhan rumah tangganya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 disebutkan juga bahwa pengelolaan kas daerah, piutang daerah, investasi jangka panjang dan juga persediaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga setelah diberlakukannya peraturan tersebut, Pemerintah Daerah mendapatkan tugasnya masing-masing untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan arahan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. (Keuangan & Penerbit, 2020)

METODE

Penelitian yang kami lakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Kami mengaplikasikan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai prosedur pengumpulan data yang menyeluruh. Melalui observasi, kami memperoleh insight dari situasi langsung dengan wawancara, kami mendapatkan perspektif langsung dari narasumber dan melalui dokumentasi, kami memperoleh data tertulis yang mendukung analisis kami. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kondisi di lapangan yang dapat mendorong perubahan.

Perkembangan kehidupan di Masyarakat sering menjadi pemicu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Faktor-faktor seperti teknologi baru, tuntutan masyarakat yang berubah, dan pergeseran kebutuhan publik menggugah perlunya transformasi. Hal ini memicu dorongan untuk mengadopsi inovasi dalam sistem pelayanan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan yang berkembang. Dalam hal ini, tantangan dan peluang baru muncul yang menuntut pemerintah untuk merancang strategi yang adaptif dan solutif guna meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat. (Alfian et al., n.d.)

Sistem kerja dipemerintahan sekarang sudah banyak melakukan inovasi terbaru guna meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif. Salah satu hal inti pendorong perubahan birokrasi dalam pemerintahan ialah perkembangan teknologi

yang cukup pesat. Dengan adanya teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan perkembangan positif di banyak sektor, salah satunya sektor pemerintahan. Dimana dahulu sektor pemerintahan mendapat banyak citra buruk Masyarakat khususnya dalam hal pelayanan, karena kurang efektif serta efisien pelayanannya dahulu sebelum adanya banyak teknologi seperti sekarang. Dengan masuknya berbagai macam teknologi yang digunakan pemerintah dalam melayani Masyarakat sekarang sangatlah berdampak positif yang mana itu dapat menghapus citra buruk tersebut. Kini terobosan-terobosan baru terus bermunculan guna memaksimalkan pelayanan terhadap Masyarakat yang efektif serta efisien. (ri Bintang Annisa'ul Choiriyah, 2018)

Hasil penelitian kami di Badan Keuangan Daerah (BKUD) kabupaten semarang menunjukkan bahwa BKUD kabupaten semarang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam bekerja dan layanan pemerintah terhadap Masyarakat. Badan keuangan daerah kabupaten semarang menyebutkan bermacam inovasinya antara lain meminimalisir penggunaan kertas (paperless) dan E-SPPT untuk digunakan pembayaran pajak melalui via online. Dari dua contoh inovasi yang diterapkan tersebut memberi bukti bahwa instansi pemerintah bisa dikatakan tidak tutup mata terhadap perkembangan zaman dan terus berusaha mengupayakan layanan terbaik kepada Masyarakat yang selaras dengan kondisi situasi modern seperti sekarang. (Agus Satrio Utomo, 2022; Umum et al., 2019)

Inovasi dalam Teknis Pengelolaan Keuangan oleh Dinas BKUD.

Seperti yang kita ketahui bahwa tugas pokok atau fungsi pokok dari Badan Dinas Keuangan Kabupaten Semarang antara lain adalah melaksanakan fungsi dalam hal menunjang keuangan daerah Kabupaten Semarang, lalu dalam hal pengelolaan seperti penganggaran APBD atau Anggaran Pembangunan Daerah, Penata Usahaan di wilayah daerah atau lebih disebut dengan pelaksanaan teknis dari APBD yang telah dirancang tersebut yang berkaitan dengan bagaimana pembelanjaan uang, dan juga untuk output pertanggungjawabannya nanti yaitu Laporan Keuangan Daerah kepada kantor pusat.

Terkait dengan kebutuhan dan pembelanjaan keperluan dari Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Semarang seperti belanja gaji dari pegawai dinas tersebut, dan belanja yang lainnya seperti kebutuhan elektronik untuk menunjang kinerja pegawainya di kantor, seperti laptop, alat cetak atau alat print, dan biaya lainnya, semua itu termasuk dalam tugas yang dijalankan oleh dinas BKUD tersebut. Dan inovasi yang telah dilakukan oleh dinas BKUD Kabupaten Semarang sekarang salah satunya adalah sudah menekan penggunaan kertas dalam penggunaan sehari-harinya. Yaitu seperti keterbutuhan rapat, keterbutuhan untuk dokumen-dokumen. Semua itu lebih dilakukan menggunakan via online atau biasa disebut dengan e-mail. Jadi lebih menekan penggunaan kertas dan anggaran biaya untuk pembelian kertas tersebut. (Zanaria & Sunyoto, 2018)

Selanjutnya terkait dengan efisiensi beban administrasi dari Badan Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Semarang sendiri yaitu terdapat aturan pokoknya yaitu ASN dan Non-ASN, sehingga efisiensinya sesuai dengan UMK untuk belanja pegawainya. Lalu juga ada bentuk efisiensi beban administrasi dalam belanja listrik dan lainnya yaitu terdapat dalam SE atau Surat Edaran dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya inovasi terkait teknis dalam pelaksanaan dalam sistemnya didalam dinas keuangan ini adalah dalam bentuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau sistem SIPD. Ini adalah bentuk inovasi dalam sifat nasional jadi sejak dalam penganggaran, penata usahaan untuk merekam atau merecord terkait uang masuk dan keluar untuk belanja, hingga nanti pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Semua hal tersebut dapat dilihat oleh seluruh masyarakat.(Agus Ngadino Iza Rumesten RS, n.d.)

Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak oleh BKUD

Didalam struktur Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang juga membawahi kantor pembayaran pajak daerah kabupaten semarang. Secara struktur, kantor pembayaran pajak daerah kabupaten semarang juga berada dalam naungan atau dibawah dinas BKUD kabupaten semarang. Banyak inovasi yang dilakukan oleh kantor pembayaran pajak untuk masyarakatnya agar lebih efisiensi dalam hal terkait pembayaran pajak. Seperti salah satunya adalah dalam bidang ESPPT. Dalam bidang ini masyarakat bisa mengakses secara online untuk membayar tagihan wajib pajak PBB yang harus dibayarkan. Inovasi ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah dalam hal pembayaran pajak dan juga dapat lebih mempersingkat waktu. Tidak harus lagi datang ke kantor pembayaran pajak untuk membayar secara offline.

Sistem ESPPT ini mempermudah dalam masyarakat untuk tata cara membayar pajak pbb dan lebih mempersingkat waktu dan efisiensi administratif. Masyarakat dapat membayarkan pajak pbb-nya melalui bank yang sudah bekerjasama dengan kantor pembayaran pajak daerah kabupaten semarang. Bank yang bekerjasama dengan kantor pajak daerah kabupaten semarang antarlain adalah Bank Jawa Tengah (Jateng), Bank Himbara, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Kantor Pos Indonesia, dan juga bekerja sama dengan platform e-commerce seperti Toko Pedia, dan juga layanan penyedia jasa seperti Gojek.(Jurnal & Saham, 2020)

Dalam sistematika untuk pembayaran wajib pajak oleh masyarakat secara online, masyarakat akan mendapatkan VA atau kode virtual account dari bank yang telah bekerjasama atau bermitra dengan kantor pembayaran pajak dan telah dipilih untuk pembayaran tersebut. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kode tersebut dengan nominal sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan sesuai wajib pajaknya, lalu bisa dibayarkan melalui tahapan-tahapan selanjutnya dengan petunjuk yang akan diberikan. Inovasi ini terbukti bahwa dapat memberikan kemudahan dalam masyarakat untuk sistematika wajib bayar pajak pbb dan juga lebih mudah dan bisa dilakukan dimana saja dan waktu yang lebih fleksibel.

KESIMPULAN

Seperti yang kita ketahui bahwa Badan Dinas Keuangan kabupaten Semarang telah semaksimal mungkin dalam melakukan kinerja mereka. Baik dalam segi inovasi dan teknis yang dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan juga berbagai macam pekerjaan yang dinilai bisa lebih efisiensi dan lebih mudah lagi dalam sistematikanya. Dinas BKUD juga terus berkembang dan juga tidak malu untuk melakukan evaluasi dalam kinerjanya, baik dalam internal maupun eksternal kantornya. Inovasi yang dilakukan seperti adanya sistem paperless yang digunakan, juga ESPPT adalah bentuk dari keinginan untuk tercapainya kinerja yang lebih baik dan efisien lagi. Dengan adanya inovasi ini, proses pembayaran pajak PBB menjadi lebih efisien, mempersingkat waktu, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada masyarakat. Ini membuktikan bahwa sistem ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi administratif dalam hal pembayaran pajak daerah. Diharapkan dengan adanya berbagai inovasi tersebut bisa membantu melayani Masyarakat dengan lebih efektif dan baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ngadino Iza Rumesten RS. (n.d.). PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI. 1–10.
- Agus Satrio Utomo, P. T. , S. (2022). IMPLEMENTASI INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SIMPEL-PBB) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN. *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 1, 1–7.
- Alfian, O. :, Izzat, N., Mustam, M., Profesor, J., Soedarto, H., Hukum, S., Semarang, T., & Pos, K. (n.d.). KINERJA ORGANISASI BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PENGELOLAAN ASET TETAP. *Jurnal, S. (, & Saham, E. (2020). SEKURITAS Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19 ARTICLES INFORMATION ABSTRACT JURNAL SEKURITAS. Jurnal SEKURITAS*, 4(1), 35–38.
- Keuangan, A., & Penerbit, N. (2020). ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA. *ri Bintang Annisa'ul Choiriyah. (2018). INOVASI PELAYANAN E-SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA. Publika*, 4–6.
- Umum, G., Metode Penelitian, D., Misi, V., Keuangan, B., Kabupaten, D., Badan, S., Daerah, K., Semarang, K., Jalan, D., Yani Nomor 55 Ungaran, A., Tengah, J., & Bkud, K. (2019). BAB III Gambaran Umum dan Visi Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
- Zanaria, Y., & Sunyoto, A. (2018). ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA METRO. In *Aris Jurnal Bisnis Darmajaya (Vol. 4, Issue 2)*.